

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dekade 1970-an dan 1980-an terkenal dengan era kebangkitan ekonomi neoklasik (*resurgence of neoclassical economics*) fokus ekonomi pembangunan lebih ditekankan pada analisis tentang keberagaman dan pengidentifikasian diferensiasi kinerja ekonomi di setiap negara berkembang berdasarkan kondisi empirisnya serta penggunaan asumsi yang berbeda-beda ketika menganalisis masalah di setiap negara berkembang. Oleh karena itu perlu kehati-hatian dalam proses pengidentifikasian hubungan kelembagaan dan unsur-unsur atau variabel penting dalam pembangunan.

Todaro & Smith (2003) menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*sustenance*), (2) meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia, dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Nilai-nilai pokok tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Amartya Sen (1999: 3) – pemenang Nobel Ekonomi 1998 - bahwa '*development can be seen, it is argued here, as a process of expanding the real freedoms that people enjoy*'

Definisi pembangunan ekonomi itu sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana meningkatkan GNP per tahun saja. Pembangunan ekonomi dapat

didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan suatu negara dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya.

Pembangunan Ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan pemberantasan kemiskinan yang absolut (Todaro, 2000).

Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan adalah isu-isu yang selalu menarik dan merupakan fokus utama dalam pembangunan ekonomi baik di tingkat global maupun nasional. Analisa hubungan segitiga anantara ketiga hal tersebut telah menjadi bahan perdebatan yang sangat panjang terutama pada pemilihan strategi pembangunan ekonomi dalam upaya pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan (*trickle down effect*).

Menurut Arsyad (1999) tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi gagal untuk mengurangi bahkan menghilangkan besarnya kemiskinan absolut. Jadi laju pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak secara otomatis meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Dengan kata lain bahwa apa yang disebut dengan "*Trickle Down Effects*" atau efek cucuran kebawah dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi penduduk miskin tidak terjadi seperti apa yang diharapkan bahkan berjalan cenderung sangat lambat. Sehingga pada realitanya harus memilih satu dari kedua pilihan (*trade off*) Pertama, apakah lebih mendahulukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan mengesampingkan

pembagian distribusi pendapatan. Kedua, apakah lebih mengutamakan distribusi pendapatan yang lebih merata tanpa harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi. W. Arthur Lewis (1984) – pemenang Nobel Ekonomi 1979 – mengatakan: "... *like everything else, economic growth has its costs*" yang berarti bahwa pembangunan ekonomi selain memberi manfaat kepada masyarakat, juga membutuhkan sebuah pengorbanan.

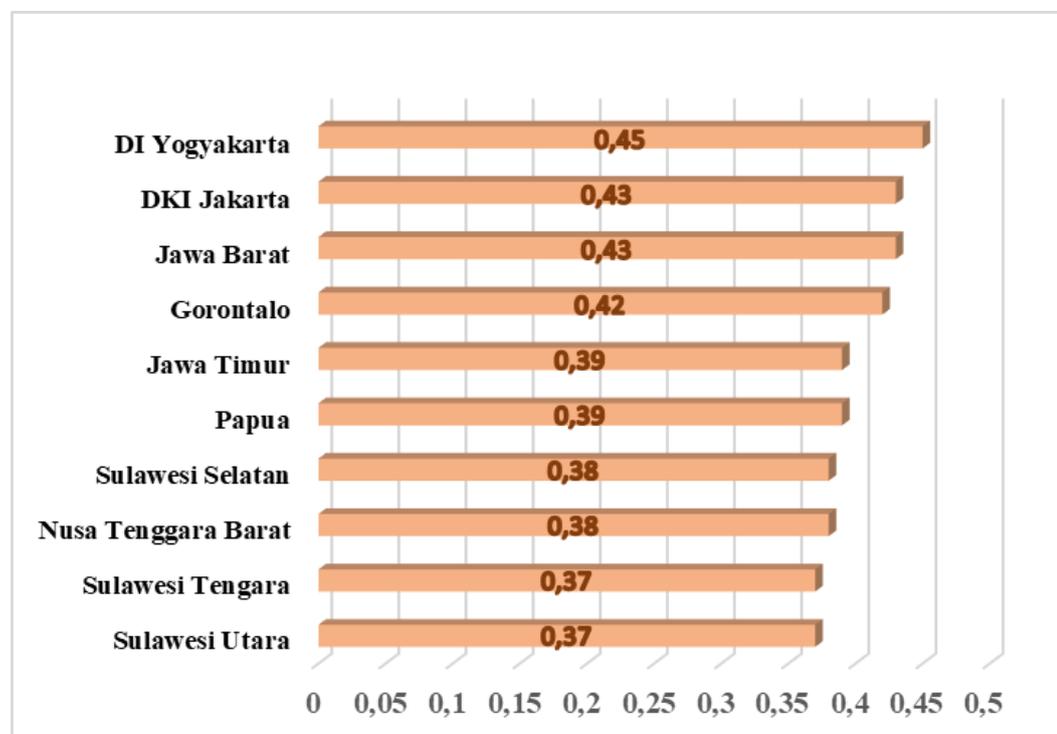
Agar keberhasilan pembangunan dapat tercapai hal terpenting dalam pembangunan yaitu daerah tersebut mampu mengidentifikasi setiap potensi sektor-sektor potensial yang dimilikinya, kemudian menganalisanya untuk membuat sektor tersebut menjadi nilai tambah bagi pembangunan ekonomi. Indonesia yang kaya akan potensi sumber daya baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan harus dapat dikelola seoptimal mungkin. Namun Indonesia yang memiliki karakteristik negara kepulauan memiliki ciri yang berbeda terutama karena faktor geografi sehingga menghasilkan sumber daya yang berbeda, tentu hal ini berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini menyebabkan setiap wilayah memiliki kelebihan dan kekurangannya dan menimbulkan perbedaan sehingga perbedaan tersebut seringkali menimbulkan *gap* atau ketimpangan.

Menurut Budi Winarno, ketimpangan merupakan akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga masyarakat.

Bandyopadhyay (2017) mengungkapkan bahwa indeks gini secara luas telah digunakan sebagai ukuran ketimpangan untuk mengukur tren ketimpangan. Banerjee (2010) juga mengungkapkan hal yang sama bahwa indeks gini merupakan

yang paling banyak digunakan dalam mengukur ketimpangan pendapatan dan dapat diperluas ke konteks multidimensi dari pengukuran kesejahteraan dan ketimpangan distribusi kesejahteraan diantara individu dalam sebuah masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Menurut Tren terbaru yang di upload oleh databoks.katadata.co.id pada maret 2023 terdapat 10 provinsi yang memiliki ketimpangan tertinggi di Indonesia sebagaimana pada gambar dibawah ini.



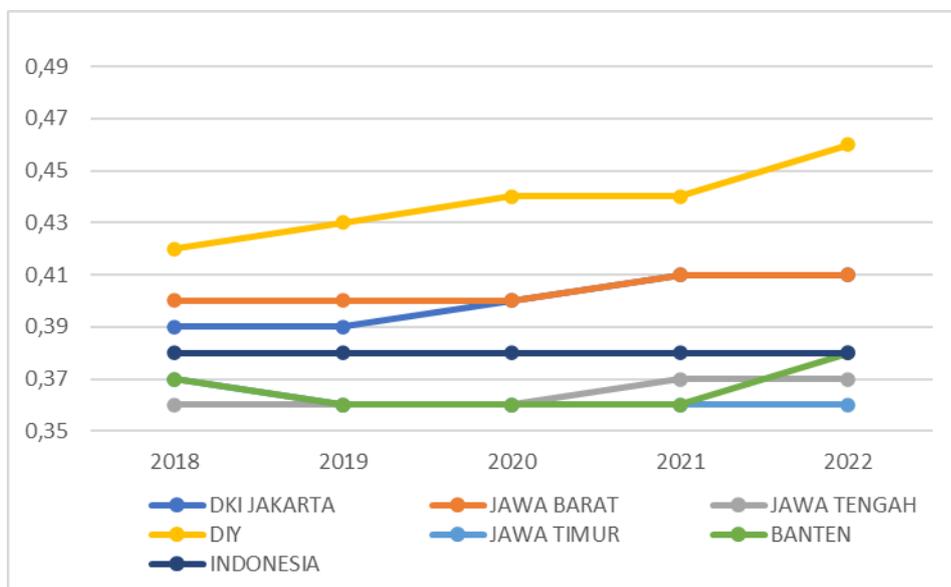
Sumber: Databoks.katadata.co.id

Gambar 1.1 Tren 10 Provinsi dengan Ketimpangan Pendapatan Tertinggi di Indonesia Tahun 2023

Pada tahun 2022 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih menjadi posisi pertama dengan tingkat ketimpangan tertinggi yaitu 0,44 diikuti oleh Provinsi DKI Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Papua, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur.

Pada tahun 2022 hingga 2023 di Indonesia terdapat dominasi wilayah yang memiliki ketimpangan tinggi yaitu di wilayah Pulau Jawa dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur menunjukkan angka yang tinggi di Indonesia adapun provinsi lain yang sama memiliki ketimpangan cukup tinggi namun apabila dilihat dari segi *income* perkapita provinsi tersebut memiliki *income* yang lebih kecil seperti di provinsi Gorontalo dan Nusa Tenggara Barat yang memiliki *income* pekapita dibawah 18 juta dan 26 juta. Sedangkan untuk provinsi DKI Jakarta memiliki *income* yang cukup tinggi (*high income*) sebesar 192 juta.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia Terdapat 3 Provinsi di Pulau Jawa yang memiliki tingkat ketimpangan diatas rata-rata.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

**Gambar 1.2 Rasio Gini 6 Provinsi di Pulau Jawa dan Rata-Rata Indonesia
Tahun 2018-2022**

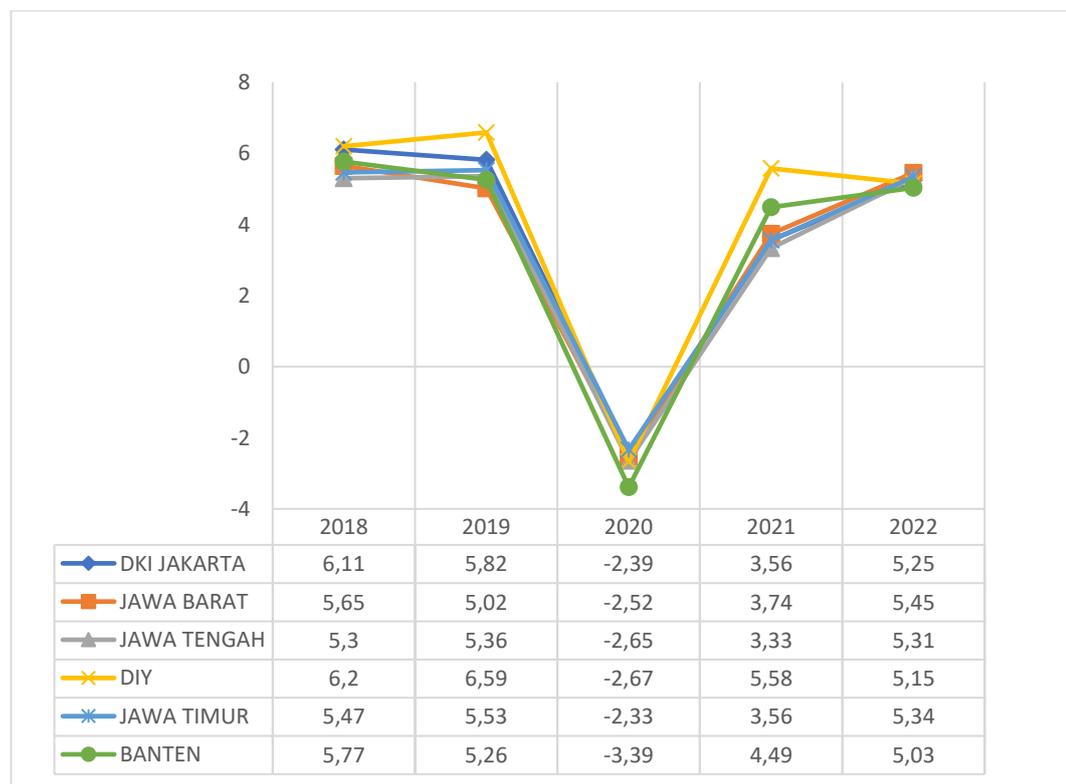
Gambar 1.2 diatas dapat terlihat bahwa sejak tahun 2018 hingga 2022 provinsi yang memiliki ketimpangan diatas rata-rata nasional Indonesia di Pulau Jawa yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Dinamika ketimpangan ini cukup fluktuatif namun cenderung mengalami kenaikan terutama di Provinsi DKI Jakarta yang setiap tahun mengalami kenaikan berbeda dengan Provinsi Banten yang cenderung menurun meskipun pada akhir tahun 2021 hingga 2022 mengalami peningkatan.

Aryad (2017) mengungkapkan bahwa indeks gini dari negara-negara yang mendapati ketimpangan rendah berada diantara 0,20-0,35. Negara dengan ketimpangan pendapatan yang rendah, jika nilai koefisien gini-nya mendekati angka 0. Sebaliknya, jika nilai koefisien gini mendekati angka 1, maka distribusi pendapatannya sangat timpang, dengan kata lain nilai koefisien gini berada pada angka 0-1. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan di Pulau Jawa memiliki ketimpangan yang cukup tinggi sehingga diperlukan perbaikan.

Dampak dari terjadinya ketimpangan dapat berupa dampak positif ataupun dampak negatif, dampak positif dari ketimpangan yaitu dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya sehingga akan tercapai kesejahteraannya. Dampak negatif dari ketimpangan antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi akan sering dipandang tidak adil. Dampak negatif ketimpangan inilah yang akan menjadi masalah pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan Masyarakat. (Krinantya, 2014).

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Pertumbuhan ekonomi ini diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya. Keberhasilan suatu pembangunan daerah salah satunya bisa dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu setiap daerah selalu menetapkan target laju pertumbuhan yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik beberapa provinsi yang ada di wilayah Pulau Jawa, dinamika laju pertumbuhan ekonominya bersifat fluktuatif.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2018-2022 (Persen)

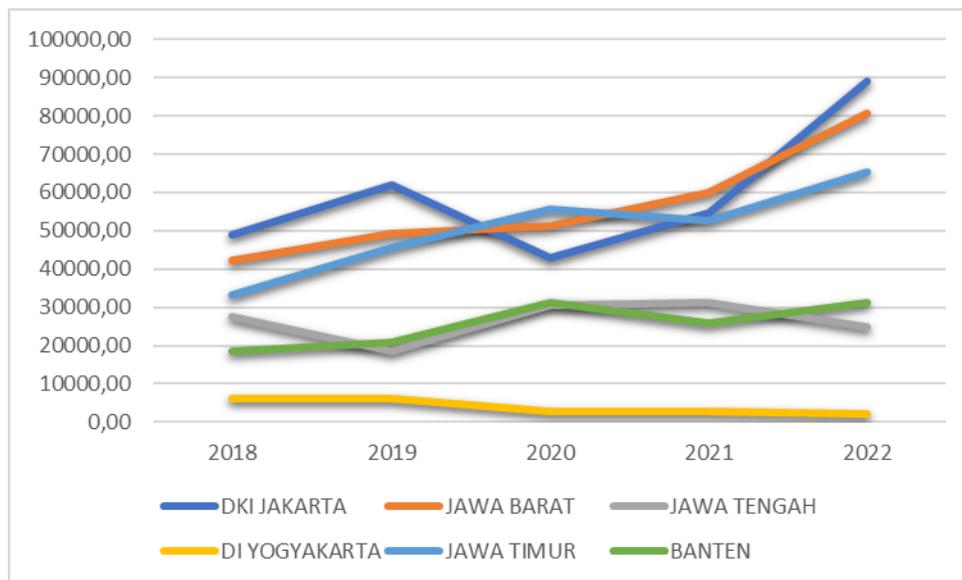
Pada Gambar 1.3 diatas di tahun 2020 mengalami penurunan tajam. Hal ini terjadi karena pandemi covid-19 sehingga kegiatan ekonomi terhambat dan mengalami resesi. Namun setelah pandemi usai aktivitas ekonomi mulai berjalan dan lebih memanfaatkan digital karena masih dalam tahap pemulihan, hal ini dapat mengembalikan ekonomi berada di posisi awal sebelum pandemi dan pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi semakin membaik dilihat dari data kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang meningkat.

Apabila diperhatikan dalam grafik antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi, Pasca pandemi pertumbuhan ekonomi meningkat namun hal ini diikuti dengan naiknya ketimpangan di beberapa provinsi, artinya pertumbuhan ekonomi yang meningkat ini tidak diikuti dengan pemerataan.

Menurut Hirschman dalam Kuncoro (2003), perbedaan antar wilayah dapat menjadi hambatan dalam pemerataan dikarenakan terkonsentrasinya suatu kegiatan perekonomian yang berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah yang memiliki sumber daya alam melimpah. Kekayaan alam yang dimiliki seharusnya dapat menjadi nilai tambah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Kelebihan yang dimiliki tersebut diharapkan dapat memberikan dampak menyebar (*spread effect*). Namun dinamika perpindahan modal yang tidak merata akan meningkatkan ketimpangan regional, peningkatan permintaan ke wilayah maju akan merangsang investasi yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan yang menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Lingkup investasi yang lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang (Jhingan, 2010).

Keadaan seperti itulah yang menyebabkan timbulnya ketimpangan pendapatan antar daerah. (Krinantya, 2014).

Untuk dapat melihat dinamika investasi yang ada di Pulau Jawa, dapat dilihat pada Gambar 1.4. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik di setiap provinsi di Pulau Jawa terdapat realisasi investasi dengan rincian aliran dana yang cukup banyak.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

**Gambar 1.4 Investasi 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2018-2022
(Milyar Rupiah)**

Pada gambar diatas dapat terlihat bahwa di provinsi tertentu seperti DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur mendapat aliran dana yang cukup banyak dan cenderung meningkat meskipun di tahun 2020 ataupun 2021 mengalami penurunan karena akibat dari pandemi covid 19 yang membuat aktivitas ekonomi yang terhambat dan terlihat pula di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki aliran dana yang tidak banyak dan cenderung bergerak statis.

Investasi merupakan langkah awal kegiatan untuk melakukan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan lesunya pertumbuhan ekonomi. Dengan tujuan untuk menumbuhkan perekonomian setiap negara akan berusaha menciptakan iklim yang dapat meningkatkan investasi. Sasaran dari upaya tiap negara tersebut tidak hanya ditujukan kepada masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri namun juga masyarakat atau swasta dari luar negeri (Dumairy, 1996).

Realisasi investasi yang dilaksanakan seringkali menjadi bumerang dan menyebabkan masalah lain. Dalam teori pertumbuhan ekonomi Harrod Dommar (Mulyadi, 2003) adanya investasi akan memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan meningkatkan stok modal, artinya investasi akan mempengaruhi dari sisi penawaran. Artinya dengan memperbesar kapasitas produksi maka akan dibutuhkan jumlah tenaga kerja yang semakin besar pula.

Menurut Irma Adelman Dan Cynthia Thaf Morris investasi yang sangat banyak namun dalam proyek-proyek yang padat modal, sehingga persentase pendapatan modal dari harta tambahan nilai lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja menyebabkan angka pengangguran akan bertambah atau meningkat dan kemiskinan akan semakin meningkat pula.

Investasi yang padat modal menjadi masalah dalam pemanfaatan sumberdaya manusia atau dalam penyerapan tenaga kerja, investasi yang seharusnya dapat meningkatkan produktivitas produksi dan menyerap tenaga kerja lebih banyak namun harus digantikan oleh mesin ataupun pemanfaatan modal lainnya

Disamping itu Arsyad (2017) mengungkapkan bahwa masalah pemerataan pendapatan juga berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk mengurangi kemiskinan agar ketimpangan pendapatan yang terjadi semakin rendah.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik dapat diketahui jumlah penduduk miskin di setiap provinsi yang ada di Pulau Jawa.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2018-2022
(Ribuan Jiwa)

Provinsi	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
DKI JAKARTA	372,26	362,30	496,84	498,29	494,93
JAWA BARAT	3539,40	3375,89	4188,52	4004,86	4053,62
JAWA TENGAH	3867,42	3679,40	4119,93	3934,01	3858,23
DIY	450,25	440,89	503,14	474,49	463,63
JAWA TIMUR	4292,15	4056,00	4585,97	4259,60	4236,51
BANTEN	668,74	641,42	857,64	852,28	829,66

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Menurut Tabel 1.1 diatas, jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa terutama di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat merupakan jumlah yang cukup banyak diantara provinsi yang lain. Namun setiap tahunnya cenderung mengalami kenaikan.

Upaya untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia dan di seluruh dunia sangat beragam dan kompleks. Dalam banyak kasus, diperlukan kombinasi intervensi ekonomi, sosial, dan politik. Pemerintah dan organisasi internasional dapat berfokus pada kebijakan dan program untuk meningkatkan akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Ini dapat melibatkan investasi dalam

pembangunan infrastruktur, memberikan bantuan keuangan kepada keluarga yang membutuhkan, dan mendukung usaha kecil. Seperti yang dijelaskan (Azhar, 2018) dalam bukunya bahwa perencanaan pembangunan seharusnya mampu merumuskan usaha dan upaya-upaya untuk keluar dari suatu lingkaran setan kemiskinan yang ada.

Banyak penelitian terdahulu yang mengkaji tentang hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan (*Poverty*) dan ketimpangan pendapatan (*Income Inequality*). (Amar et al., 2020) menerangkan bahwa pada negara-negara berkembang kemiskinan dan ketimpangan pendapatan cenderung menurun sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi.

Menurut (Mthuli Ncube, John C. Anyanwu and Kjell Hausken, 2013) menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan menurunkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan di wilayah tersebut.

Menurut (Heryanah, 2017) yang menjelaskan bahwa masalah ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah utama untuk diselesaikan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dipertanyakan apakah berdampak terhadap seluruh kalangan masyarakat atau hanya dinikmati oleh beberapa kalangan saja.

Selanjutnya tentang investasi yang berkaitan dan mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Menurut Hana Shavira Octavia (2021) Investasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai dinamika ketimpangan pendapatan di provinsi yang ada di Pulau Jawa dengan

menganalisis faktor-faktor penyebabnya. Bagaiman pengaruh antara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan investasi terhadap *income inequality*.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas maka diperoleh beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan investasi secara parsial terhadap *income inequality* di Pulau Jawa pada Tahun 2018-2022?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan investasi secara bersama-sama (simultan) terhadap *income inequality* di Pulau Jawa pada Tahun 2018-2022?

1.3 Tujuan

Bedasarakan identifikasi masalah yang diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan investasi secara parsial terhadap *income inequality* di Pulau Jawa pada Tahun 2018-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan investasi secara bersama-sama (simultan) terhadap *income inequality* di Pulau Jawa pada Tahun 2018-2022.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak manapun yang berkepentingan. Adapun manfaat penelitian ini diantaranya:

1.4.1. Kegunaan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

a. Bagi Mahasiswa

Untuk mengembangkan dan menambah wawasan penulis terkait masalah penelitian yang diteliti yaitu pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan investasi terhadap *income inequality* di Pulau Jawa pada Tahun 2018-2022.

b. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu tambahan informasi di lingkungan untuk para mahasiswa dan pihak terkait lainnya di Universitas Siliwangi khususnya di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk penelitian selanjutnya mengenai *income inequality*.

1.4.2. Kegunaan Praktis

a. Sebagai informasi dan kajian tambahan yang bermanfaat bagi pemerintah dalam

rangka menangani dan mengurangi kasus *income inequality* di Pulau Jawa.

b. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam pengambilan keputusan terkait

income inequality dan di Pulau Jawa.

